

## ANALISIS KEBUTUHAN PEMBELAJARAN EKONOMI SESUAI PASAL 33 UUD 1945 PADA JENJANG SEKOLAH DASAR

Eunike Rose Mita Lukiani<sup>1</sup>, Ery Tri Djatmika RWW<sup>2</sup>, Agus Suman<sup>3</sup>, dan  
Mit Witjaksono<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa S3 Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Malang, & Staf Pengajar Universitas  
Nusantara PGRI Kediri, Indonesia \* E-mail: eunikemita@gmail.com

<sup>2,4</sup> Universitas Negeri Malang, Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Brawijaya, Indonesia

---

### Abstrak

*Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar konstitusi kegiatan perekonomian di Indonesia. Segala aspek kegiatan ekonomi di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Demikian juga dalam pendidikan ekonomi. Pendidikan ekonomi memegang peran kunci dalam membentuk manusia Indonesia sesuai cita-cita dan tujuan bangsa. Penting sekali mengajarkan ideologi perekonomian Indonesia sejak jenjang pendidikan sekolah dasar karena gaya hidup yang dijalani saat ini merupakan hasil dari kebiasaan sejak kanak-kanak. Dengan mengajarkan pendidikan ekonomi sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai core content, akan terjadi keterlekatan yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku ekonomi yang benar bagi anak-anak sebagai generasi penerus sumber daya manusia Indonesia. Bila karakter manusia Indonesia telah mendarah daging, maka pengaruh budaya ekonomi asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai perekonomian Indonesia tidak akan mudah masuk dan mempengaruhi kepribadian manusia Indonesia.*

**Kata Kunci:** *Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, Sekolah Dasar*

---

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum (konstitusi) yang melandasi sistem perekonomian Indonesia. Sebagai dasar konstitusi berarti, Pasal 33 Undang-Undang 1945 bersifat mengikat, dan wajib dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Segala kegiatan perekonomian di Indonesia harus berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Demikian juga dalam pendidikan ekonomi. Pendidikan ekonomi di Indonesia harus dilandasi pasal 33 UUD 1945

dalam membentuk manusia Indonesia yang sesuai dengan cita-cita dan tujuan bangsa.

Sayangnya, pendidikan ekonomi di Indonesia selama ini telah jauh meninggalkan nilai-nilai dalam pasal 33 Undang-Undang 1945. Pendidikan ekonomi yang diajarkan tidak sesuai dengan pasal 33 sebagai landasan konstitusi perekonomian Indonesia, tetapi justru mengadopsi dari luar, yang bahkan tidak memperhatikan akar budaya asli Indonesia dengan kurikulum yang

mengacu pada buku-buku teks Amerika yang berideologi Neoklasik.

Padahal dengan mengajarkan pendidikan ekonomi sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar akan diperoleh kepribadian dan karakter manusia Indonesia, yang sejalan dengan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.23 tahun 2003 sebagai berikut.

*Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.*

Sekolah Dasar merupakan jenjang pendidikan formal yang wajib ditempuh oleh seluruh warga negara Indonesia. Dengan mengajarkan pendidikan ekonomi sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sejak

dini sebagai *core content*, akan terjadi keterlekatan yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku ekonomi yang benar bagi anak-anak sebagai generasi penerus sumber daya manusia Indonesia.

Sebagaimana dikemukakan oleh Muhtadi (2014: 101) sebagai berikut:

*Gaya hidup yang dijalani saat ini sesungguhnya juga merupakan kesinambungan dari gaya hidup yang dijalani sejak kanak-kanak. Bagaimana gaya hidupnya ketika kecil, sedikit banyak atau malah memang banyak, akan menjadi pola dasar, menjadi blueprint, dari gaya hidupnya ketika dewasa, yang akan terbawa hingga ia menjadi tua sampai akhirnya nanti menutup harinya dalam kehidupan ini*

## KAJIAN LITERATUR

### Pendidikan Ekonomi di Indonesia

Pendidikan Ekonomi jenjang formal di Indonesia dimulai sejak tingkat Sekolah Dasar. Pada tingkat Sekolah Dasar pendidikan ekonomi belum berdiri sendiri akan tetapi terintegrasi dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Berikut

topik-topik pembelajaran ekonomi di Indonesia.

**Topik-topik Pembelajaran  
Ekonomi yang terintegrasi dalam  
Mata Pelajaran IPS di tingkat  
Sekolah Dasar (SD)**

Kelas 3 Sekolah Dasar terdiri atas: (1) Kerjasama di Lingkungan; (2) Jenis-jenis Pekerjaan; (3) Kegiatan Jual Beli; (4) Sejarah Uang; dan (5) Kegunaan Uang.

Kelas 4 Sekolah Dasar terdiri atas: (1) Pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam Kegiatan Ekonomi; (2) Kegiatan Ekonomi Berdasarkan Potensi Alam; dan (3) Pentingnya Koperasi Bagi Kesejahteraan Masyarakat.

Kelas 5 Sekolah Dasar, yakni tentang Usaha dan Kegiatan Ekonomi di Indonesia

Kelas 6 Sekolah Dasar, terdiri atas: (1) Globalisasi; dan (2) Ekspor-impor

**Topik-topik Pembelajaran  
Ekonomi yang terintegrasi dalam  
Mata Pelajaran IPS di tingkat  
Sekolah Menengah (SMP)**

Kelas 7 Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas: (1) Usaha Manusia Dalam Memenuhi Kebutuhan; (2) Kegiatan Pokok Ekonomi; (3) Perusahaan Dan Badan Usaha Serta Peranannya; dan (4) Kreatif Dan Inovatif Dalam Tindakan Ekonomi.

Kelas 8 Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas: (1) Hubungan Kelangkaan Sumber Daya dengan Kebutuhan Manusia; (2) Pelaku-pelaku Ekonomi; (3) Bentuk-bentuk Pasar; (4) Ketenagakerjaan; (5) Pelaku Ekonomi Indonesia; (6) Pajak; dan (7) Permintaan dan Penawaran.

Kelas 9 Sekolah Menengah Pertama, yang terdiri atas: (1) Negara berkembang dan negara maju; (2) Uang dan Lembaga Keuangan; dan (3) Kerjasama Ekonomi Internasional

**Topik-topik Pembelajaran  
Ekonomi di tingkat Sekolah Atas  
(SMA)**

Kelas X Sekolah Menengah Atas, terdiri atas: (1) Ilmu Ekonomi; (2) Kebutuhan Manusia, Kelangkaan Sistem Ekonomi; (3) Kegiatan Ekonomi Konsumen dan Produsen; (4) Permintaan, Penawaran, Harga Keseimbangan, dan Pembelajaran; (5) Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Ekonomi; (6) Pendapatan Nasional Inflasi; (7) Fungsi Konsumsi, Tabungan dan Investasi; dan (8) Uang dan Bank.

Kelas XI Sekolah Menengah Atas, terdiri atas: (1) Tenaga kerja dan pembangunan ekonomi; (2) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD); (3) Pasar Modal; (4) Perekonomian Terbuka; (5) Sistem Informasi dan Akuntansi; (6) Persamaan Dasar Akuntansi; (7) Siklus Akuntansi Perusahaan Jasa.

Kelas XII Sekolah Menengah Atas, terdiri atas: (1) Badan usaha dalam perekonomian Indonesia; (2) Koperasi sekolah; (3) Koperasi; (4) Akuntansi perusahaan Dagang; (5)

Manajemen; dan (6) Wirausaha

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa topik-topik pembelajaran ekonomi di Indonesia belum mengedepankan pasal 33 UUD 1945 sebagai *core content* ideologi perekonomian. Sebagai bahan rujukan berikut merupakan topik-topik pelajaran ekonomi yang diajarkan di Amerika dan Australia

**Topik-topik Pembelajaran  
Ekonomi di Amerika Serikat yang  
mulai diajarkan di tingkat (*grade*)  
4 sampai tingkat (*grade*) 12 pada  
anak usia 9 sampai 12 tahun**

Yakni: Scarcity; Decision Making; Allocation; Incentives; Trade; Specialization; Market and Prices; Role of Prices; Competition and Market Structure; Institutions; Money and Inflation; Interest Rates; Income; Entrepreneurship; Economic Growth; Role of government, market Failure; Government Failure; Economic Fluctuations; Unemployment and Inflation; dan Fiscal and Monetary Policy

**Topik-topik Pembelajaran**

**Ekonomi di Australia yang mulai diajarkan di tahun (year) 5 sampai tahun (year) 10 pada anak usia 10 sampai 15 tahun**

Year 5 (10 year old), yakni: (1) The difference between needs and wants and why choices need to be made about how limited resources are used; (2) Types of resources (natural, human, capital) and the ways societies use them in order to satisfy the needs and wants of present and future generations; dan (3) Influences on consumers choices and methods that can be used to help make informed personal consumer and financial choices.

Year 6 (11 year old), yakni: (1) How the concept of opportunity cost involves choices about the alternative use of resources and the need to consider trade-offs; (2) The effect that consumer and financial decisions can have on the individual, the broader community and the environment; dan (3) The reasons businesses exist and the different ways they provide goods and services.

Year 7 (12 year old), yakni: (1) The ways consumers and producers respond to and influence each other in the market; (2) Why and how individuals and businesses plan to achieve short-term and long-term personal, organisational and financial objectives; (3) Characteristics of entrepreneurs and successful businesses; dan (4) Why individuals work, types of work and how people derive an income.

Year 8 (13 year old), yakni: (1) The ways markets operate in Australia and why they may be influenced by government; (2) The traditional markets of Aboriginal and Torres Strait Islander communities and their participation in contemporary markets; (3) The rights and responsibilities of consumers and businesses in Australia; (4) Types of businesses and the ways that businesses respond to opportunities in Australia; dan (5) Influences on the ways people work and factors that might affect work in the future.

Year 9 (14 year old), yakni: (1) Australia as an 'economy' and its

place within the broader Asia and global economy; (2) Why and how participants in the global economy are dependent on each other; (3) Why and how people manage financial risks and rewards in the current Australian and global financial landscape; (4) How and why businesses seek to create and maintain a competitive advantage in the global market; dan (5) The role responsibilities of participants in the changing Australian or global workplace.

Year 10 (15 year old), yakni: (1) *Indicators of economic performance and how Australia's economy is performing*; (2) *The links between economic performance and living standards, the variations that exist within and between economies, and possible causes*; (3) *The ways that governments manage the economy to improve economic performance and living standards*; (4) *Factors that influence major consumers and financial decisions and the short- and long term consequences of these decisions*; dan (5) *The ways businesses organise themselves to improve productivity, including the ways they manage their workforce, and how they respond to changing economic conditions*

Pembelajaran ekonomi di Amerika Serikat menggunakan *content standard* yang disusun oleh

*Council for Economic Education / CEE* (NCEE) yang selanjutnya banyak menjadi rujukan pembelajaran ekonomi negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Hal ini jelas tidak sesuai dengan jati diri dan sistem perekonomian nasional Indonesia yang termuat dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

## PEMBAHASAN

### Karakteristik Sistem Ekonomi Indonesia

Berbeda dengan sistem ekonomi komando maupun sistem ekonomi liberal, ciri khas “humanis” melekat pada sistem ekonomi Indonesia. Perekonomian yang penuh rasa kebersamaan dan kekeluargaan dijelaskan sebagai berikut:

### Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari berbagai kemajemukan. Kemajemukan suku bangsa dengan kebudayaan yang melekat didalamnya kemudian bersatu dalam semboyan *Bhinneka*

*Tunggal Ika* yang berarti “*walau berbeda-beda tetap satu jua*”.

Meskipun merupakan bangsa yang majemuk, namun bangsa Indonesia merasa menjadi satu bangsa. Dasar filosofis itulah yang menjadikan sistem ekonomi Indonesia penuh dengan nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan. Persaingan individu bukanlah karakter bangsa Indonesia.

Dasar kekeluargaan dalam kegiatan ekonomi timbul dari kesadaran bahwa kebahagiaan tidak hanya dengan terpenuhinya kebutuhan jasmani saja, tetapi juga terpenuhinya kebutuhan rohani. Oleh karena itu dalam menjalankan kegiatan ekonomi, manusia Indonesia harus menjalankan dengan penuh tanggung jawab sebagai bagian dari ibadah. Kegiatan ekonomi harus membawa manfaat bagi sesama manusia baik dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

**Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara**

Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan

menguasai hajat hidup orang banyak terdiri dari barang dan jasa yang vital bagi kehidupan manusia dan tersedia dalam jumlah terbatas. Negara menguasai cabang-cabang produksi dan kekayaan alam tertentu untuk menjamin perlindungan orang banyak dan demi kemakmuran rakyat secara maksimal (Murybarto, 1994).

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan “kuasa” sebagai *wewenang atas sesuatu untuk menentukan dapat berupa memerintah, mewakili, mengurus, dan sebagainya*. Dipandang dari sudut kepemilikan, istilah “dikuasai” memiliki derajat lebih rendah daripada istilah “dimiliki”. Makna dikuasai oleh negara dalam pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mencakup kekuasaan negara untuk mengatur (*regelendaad*), mengurus (*bestuursdaad*), mengelola (*beheersdaad*), dan menguasai (*toezichthoudensdaad*)” Hal ini berarti penguasaan negara atas sumber daya alam bukan hak eksklusif yang berupa kepemilikan pribadi, tetapi negara hanya sebagai penerima amanah.



Negara mengakui dan member tempat terhadap sektor-sektor swasta adalah pada cabang-cabang produksi yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Sifat efisiensi dan inovati pada sektor swasta berkontribusi sebagai penggerak dalam perekonomian. Pemerintah juga ingin melihat pengusaha-pengusaha swasta nasional dapat tumbuh dengan kuat, menjadi ujung tombak kemajuan dan kreativitas perekonomian nasional.

**Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat**

Sistem ekonomi Indonesia menegaskan bahwa penguasaan atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya demi dan hanya untuk kemakmuran rakyat Indonesia, bukan kemakmuran orang-perseorang.

Sistem ekonomi Indonesia memaknai kemakmuran adalah “*Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia*” yaitu keadilan ekonomi sekaligus pembagian distribusi yang adil setelah proses produksi

terselesaikan (Murybarto 1994). Masyarakat yang jelas-jelas mengesampingkan nilai keadilan (mengesampingkan pemerataan) pastilah akan mengalami gejolak-gejolak sosial. Kemudian cepat atau lambat akan meruntuhkan sendi-sendi kehidupannya dan mengancam kelestariannya.

**Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.**

Demokrasi ekonomi adalah tegaknya kedaulatan rakyat dalam perekonomian. Kegiatan ekonomi bersumber dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

*Dari rakyat*, berarti perekonomian nasional terlaksana setelah mendapat mandat dari rakyat. Rakyat adalah pemegang kedaulatan ekonomi, sehingga rakyat adalah pihak yang paling berkuasa menetapkan tatatan ekonomi melalui wakil-wakilnya.



*Oleh rakyat*, berarti penyelenggaraan perekonomian wajib dilaksanakan oleh rakyat baik melalui partisipasi dan emansipasi. *Untuk rakyat*, berarti tujuan dari penyelenggaraan perekonomian nasional adalah untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Hasil kekayaan alam harus digunakan untuk kepentingan bersama dengan tetap memperhatikan keadilan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

## KESIMPULAN

Pada jenjang sekolah dasar pengetahuan disesuaikan dengan perkembangan usia peserta didik. Demikian juga dengan pengetahuan ekonomi, internalisasi konsep-konsep ekonomi Indonesia yang sesuai pada jenjang sekolah dasar yaitu: 1) Kegiatan ekonomi yang mengutamakan musyawarah dengan sikap rendah hati, 2) Tolong-menolong, gotong-royong dalam mewujudkan perekonomian yang kuat, 3) Rasa cinta terhadap produk-produk hasil negaranya sendiri

4) Senantiasa memperhatikan keberlanjutan dan berwawasan lingkungan dari kegiatan ekonomi yang dilakukannya.

Penting sekali menanamkan pendidikan ekonomi berdasarkan nilai-nilai budaya Indonesia sejak dini guna membentuk manusia Indonesia sesuai sifat, kelakuan dan karakter Indonesia.

Dengan mengajarkan esensi kebudayaan Indonesia akan diperoleh kepribadian dan karakter manusia Indonesia. Karakter yang dilandasi moral. Moral yang diperoleh dari nilai-nilai budaya, ajaran agama dan kepercayaan yang dianut oleh setiap insan manusia Indonesia. Bila karakter yang bermoral demikian telah menjadi darah daging serta kebiasaan bangsa Indonesia maka mampu membentengi dari pengaruh ekonomi asing yang mengutamakan keegoisan, korupsi, keserakahan, dan lain-lain.

Mengajarkan pendidikan ekonomi sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sejak dini sebagai *core content*, pada dasarnya sama dengan berinvestasi jangka panjang yaitu *investment of human*

*skill* dan *mental skill* dimana akan terjadi keterlekatan yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku ekonomi yang benar bagi anak-anak sebagai generasi penerus sumber daya manusia Indonesia.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Conway, Edmund. (2011). 50 Gagasan Ekonomi yang Perlu Anda Ketahui. Jakarta: Erlangga.
- Dahana, Panca Radhar. (2015). Ekonomi Cukup Kritik Budaya pada Kapitalisme. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Daulat Ra'jat Buku 1 Taun 1931 – 1932 Terbitan Khusus Satu Abad Bung Hatta. Jakarta: Yayasan Hatta.
- Deliarnov. 2005. Perkembangan Pemikiran Ekonomi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Etzioni, Amitai. 1992. Dimensi Moral Menuju Ilmu Ekonomi Baru. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Grossman, Gregory. 1995. Sistem-Sistem Ekonomi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ismail, Munawar dkk. (2014). Sistem Ekonomi Indonesia Tafsiran Pancasila dan UUD 1945. Jakarta: Erlangga.
- Jessua, Claude. (2015) Kapitalisme. Yogyakarta: Jalasutra.
- Murbyarto. (1990). Ekonomi Pancasila Gagasan dan Kemungkinan. Jakarta: LP3S
- Murbyarto. (1994). Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia. Jakarta: LP3S
- Petras, James & Henry Veltmeyer. 2014. Menelanjangi Globalisasi Sepak Terjang Imperialisme di Abad 21. Bantul: Kreasi Wacana.
- Pustaka Materi. 2015. Materi IPS kelas III SD. Diakses dari <http://pustakamateri.web.id/materi-ips-kelas-3-sd/> tanggal 9 Mei 2016
- \_\_\_\_\_. 2015. Materi IPS kelas IV SD. Diakses dari <http://pustakamateri.web.id/materi-ips-kelas-4-sd/> tanggal 10 Mei 2016
- \_\_\_\_\_. 2015. Materi IPS kelas V SD. Diakses dari <http://pustakamateri.web.id/materi-ips-kelas-4-sd/> tanggal 10

Mei 2016

\_\_\_\_\_. 2015. Materi 1PS kelas VI SD. Diakses dari <http://pustakamateri.web.id/materi-ips-kelas-4-sd/> tanggal 10 Mei 2016

\_\_\_\_\_. 2015. Materi 1PS kelas VII SMP. Diakses dari <http://pustakamateri.web.id/materi-ips-kelas-4-sd/> tanggal 10 Mei 2016

\_\_\_\_\_. 2015. Materi 1PS kelas VIII SMP. Diakses dari <http://pustakamateri.web.id/materi-ips-kelas-4-sd/> tanggal 10 Mei 2016

\_\_\_\_\_. 2015. Materi 1PS kelas IX SMP. Diakses dari <http://pustakamateri.web.id/materi-ips-kelas-4-sd/> tanggal 10 Mei 2016

\_\_\_\_\_. 2015. Materi 1PS kelas X SMA. Diakses dari <http://pustakamateri.web.id/materi-ips-kelas-4-sd/> tanggal 10 Mei 2016

\_\_\_\_\_. 2015. Materi 1PS kelas XI SMP. Diakses dari <http://pustakamateri.web.id/materi-ips-kelas-4-sd/> tanggal 10 Mei 2016

\_\_\_\_\_. 2015. Materi 1PS kelas XII SMP. Diakses dari <http://pustakamateri.web.id/materi-ips-kelas-4-sd/> tanggal 10 Mei 2016

Rusman. 2012. Manajemen Kurikulum Seri Manajemen Sekolah Bermutu. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sinamo, Jansen. 2014. Revolusi Mental dalam Institusi, Birokrasi, dan Korporasi. Jakarta: Institut Darma Mahardika.

Skusen, Mark. (2009). Sejarah Pemikiran Sang Maestro Teori-Teori Ekonomi Modern Sebuah Narasi Kritis Menyikapi Pergumulan Intellektual dan Kepedihan Sosial di dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Ekonomi. Jakarta: Kencana.

Soetomo, 2014, *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif Masyarakat Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Subandi. (2014). Sistem Ekonomi Indonesia. Bandung: Alfabeta

Subroto, W.T. (2012) Revitalization of Pancasila Economic System in

The Globalization Era, *Journal of Economics and Sustainable Development*, Vol.3, No.11, 2012, p1-11

Suhardin, Y. & Siahaan, R.H. (2014),  
Populist Economy in The State  
of Welfare Law of Indonesia,  
*International Journal of  
Business, Economics and Law*,  
Vol. 5, Issue 4, p76-81

Swasono, E. S. (2010). Indonesia dan  
Doktrin Kesejahteraan Sosial  
Dari Klasik dan Neoklasikal  
Sampai ke The End of Laissez-  
Faire. Jakarta: PraKarsa

Wahjoedi. (2015). Merehabilitasi  
Pendidikan Ekonomi,  
Memperkuat Jati Diri  
Perekonomian Indonesia.  
Pidato Pengukuhan Jabatan  
Guru Besar dalam Bidang Ilmu  
Ekonomi dan Pendidikan  
Ekonomi pada Fakultas  
Ekonomi. Malang: Universitas  
Negeri Malang.